

SPIRIT GUSJIGANG KUDUS DAN TANTANGAN GLOBALISASI EKONOMI

Muhamad Mustaqim dan Ahmad Bahruddin

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

APII Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

muhamadmustaqim10@gmail.com, bahruddin_ahmed@gmail.com

Abstract

THE SPIRIT OF GUSJIGANG KUDUS AND THE ECONOMIC GLOBALIZATION CHALLENGES. This paper intends to reveal the role of Gusjigang business spirituality in facing the global economy. Kudus society known to have unique typology in business and learning, it is known as "Gusjigang", it stands for the good, recite the Qur'an, and trade. Studies on the relationship between spirituality and business have been conducted a lot, but the study of the ethical spirit that focuses on business behavior of Muslim community in the context of the trend of economic globalization would still limited. The unique format and typology resulting from this study is expected to be a new concept for the development of Islamic economics and business at a different time and space in the future. In general, the results of this study came to the conclusion that Gusjigang spirit as glocalitas in business behavior. Glocalitas is a local moral value that is expected to become a universal character. This universal value if applied in the free competition, it will generate business behavior which always brings the perpetrators to goodness.

Keywords: *Gusjigang, Globalization, Economics.*

Abstrak

Tulisan ini bermaksud mengungkap peran spiritualitas bisnis Gusjigang dalam menghadapi ekonomi global. Masyarakat Kudus dikenal memiliki tipologi unik dalam berbisnis dan belajar, yang dikenal dengan istilah “Gusjigang”, kepanjangan dari bagus, ngaji, dan dagang. Kajian tentang hubungan antara spiritualitas dan perilaku bisnis memang sudah banyak dilakukan, tetapi kajian tentang spirit etik yang berfokus pada perilaku bisnis masyarakat Muslim konteksnya dengan kecenderungan globalisasi ekonomi kiranya masih terbatas. Format dan tipologi unik yang dihasilkan dari kajian ini diharapkan mampu menjadi konsep baru untuk pengembangan ekonomi dan bisnis Islam pada ruang dan waktu yang berbeda di masa mendatang. Secara umum, hasil kajian ini sampai pada penyimpulan spirit Gusjigang sebagai glocalitas dalam perilaku bisnis. Glocalitas merupakan nilai kearifan lokal yang diharapkan mampu menjadi karakter universal. Nilai universal ini jika diterapkan dalam persaingan bebas, maka akan menghasilkan perilaku bisnis yang senantiasa membawa pelakukannya kepada kebaikan.

Kata Kunci: *Gusjigang, Globalisasi, Ekonomi.*

A. Pendahuluan

Antony Giddens pernah mengatakan bahwa globalisasi bukanlah apa yang ada dan terlihat di luar sana. Akan tetapi, globalisasi adalah apa yang memengaruhi aspek kehidupan kita yang sangat intim dan pribadi sekalipun.¹ Pernyataan ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa proses globalisasi telah menembus batas pertahanan sebuah negara. Ia masuk dan mengalir bersama arus masuk informasi dan teknologi yang tak terbendung. Jika hulunya adalah sistem informasi, maka hilirnya adalah perilaku manusia yang tersentuh oleh arus tersebut.

Sebagaimana kita pahami bahwa perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini berkembang pesat mensyaratkan adanya keterbukaan pasar di setiap negara. Ketika Samsung, misalnya, meluncurkan produk barunya di Korea Selatan, maka dalam hitungan detik, produk tersebut mengalir cepat ke negeri

¹ Antoni Giddens, *Jalan Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 37.

kita. Dan, teknologi informasi telah melahirkan gaya hidup dan budaya baru bernama konsumerisme.

Konsumerisme ini menandakan ketergantungan manusia akan teknologi. Meskipun sudah mempunyai gadget terbaru yang diluncurkan sebulan yang lalu, orang akan tetap antre untuk membeli produk mutakhir sebuah handphone. Dan, kecenderungan ini tentu saja dimanfaatkan oleh produsen untuk mengendalikan dan menguasai pasar. Pada sektor pasar dan perdagangan, beberapa kawasan regional saat ini telah menjalin kesepakatan tentang ekonomi dan perdagangan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah satu dari sistem ekokomi regional yang mengandaikan adanya pasar bebas dalam ekonomi dan perdagangan. MEA efektif mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Dampaknya, setiap orang harus bersaing secara sempurna untuk merebut hati pasar.

Pada tataran lokal, globalisasi dalam bentuk MEA ini akan memberikan peluang sekaligus ancaman bagi keberlangsungan usaha kecil menengah. Pengusaha pribumi harus berjuang keras untuk mampu bersaing dengan gempuran produk dari luar negeri. Pada konteks Kudus, misalnya, bagaimana usaha kecil menengah ini harus mampu bertahan menghadapi pasar global dan regional yang berbasis pasar bebas.

Di Kudus, ada sebuah istilah yang dinisbatkan untuk masyarakat Kudus yang suka berdagang, yaitu istilah Gusjigang. Istilah dan filosofi Gusjigang (*bagus*, *ngaji*, dan *dagang*) selama ini diyakini sebagian orang sebagai citra diri masyarakat Kudus. Filosofi ini merupakan warisan budaya yang konon dicituskan oleh Sunan Kudus sebagai peletak dasar kota Kudus. Gusjigang mengisyaratkan bahwa tapak laku Muslim itu haruslah bagus (*baik*), bisa mengaji, dan pandai berdagang. Ada semacam integritas antara perilaku agama dan pekerjaan, yang ketiga hal tersebut tentu saja menjadi karakter bagi setiap manusia.

Dalam dimensi budaya, Gusjigang merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi yang senantiasa

dilestarikan. Warisan budaya ini secara sistemik menjadi dasar kearifan lokal sehingga ada pertalian antara cara berpikir dan perilaku masyarakat dengan sistem nilai yang diyakininya. Hal ini tidak lepas dari karakter kepeloporan Sunan Kudus yang dikenal sebagai santri sekaligus juga saudagar pelaku bisnis.²

Filosofi inilah yang kemudian berkembang dan berdiaspora pada diri masyarakat Kudus, menjadi karakter diri yang membudaya di setiap generasi yang dilahirkan. Berdagang atau berbisnis tidak lagi dimaknai sebagai urusan duniawi belaka, tetapi juga harus berperilaku bagus dan religius. Sehingga, keuntungan yang didapatkan tidak hanya keuntungan duniawi, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Dan, bisa bermanfaat bagi individu ataupun sosial.

Memang benar, saat ini Kudus telah menjadi kota sentra perdagangan (*trade centre*) yang cukup berkembang dan berpotensi berskala internasional. Hal ini ditandai dengan status Kudus yang menjadi salah satu kabupaten pro investasi di Jawa Tengah peringkat keempat dari 32 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.³ Sekalipun Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten “terkecil” di Jawa Tengah dan hanya memiliki luas wilayah $\pm 42.517 \text{ km}^2$ (menurut data BPS 2015), tetapi menjadi kota industri yang memiliki berbagai jenis perusahaan serta menjadi sentra ekonomi kecil dan menengah yang mampu berkembang pesat seiring dengan denyut nadi perekonomian masyarakat.

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah perusahaan di Kabupaten Kudus mencapai 13.482 perusahaan yang terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kaliwungu. Adapun jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus mencapai 10.954 UMKM dengan konsentrasi bidang usaha yang berbeda-beda. Industri tembakau dan rokok memegang peranan

²Nur Said, *Jejak Perjuangan Sunan Kudus* (Yogyakarta: Brillian Media Utama, 2010), hlm. 380.

³www.jatengprov.go.id.

penting dan dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 80.000 orang lebih.⁴ Hal ini menjadi indikator tingkat perkembangan bisnis yang cukup besar, yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

Jika dibuat korelasi sederhana, tampaknya ada pengaruh yang signifikan antara karakter Gusjigang tersebut dengan perkembangan bisnis masyarakat Kabupaten Kudus, khususnya para pengusaha Muslim. Spirit bisnis yang kuat dan ulet dalam konteks ini sangat mungkin dipengaruhi oleh spiritual religious seseorang. Meminjam istilah Max Webber, inilah yang kemudian disebut dengan spirit etik.

B. Pembahasan

1. Globalisasi Ekonomi

Trend globalisasi ditandai dengan tergesernya peran negara yang selama ini berfungsi melindungi warganya. Adalah sebuah permakluman, jika negara merupakan sebuah entitas, di mana orang-perorang berafiliasi di dalamnya untuk sebuah tujuan. Bahkan, untuk tujuan bersama tersebut, negara mempunyai kemampuan memaksa anggotanya untuk menaati apa yang menjadi konsensus bersama tersebut. Bahkan Indonesia, sebuah negara-bangsa yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya, mempunyai tekad bersama untuk mampu mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, “keperkasaaan” negara sebagaimana yang selama ini diyakini ada, saat ini akan mengalami pergeseran yang cukup krusial. Oleh globalisasi, negara mencoba dikebiri oleh sebuah pisau yang bernama pasar.

Tesis Karl Marx tentang kehancuran kapitalisme ternyata tidak terbukti. Dan, ini menjadi semangat para pemikir kekekalan pasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan inovasi, yang disesuaikan dengan zaman yang ada. Dalam sejarah panjangnya, kapitalisme telah mengalami beberapa “reinkarnasi” dengan

⁴www.kuduskab.go.id.

tampilan dan sistem kerja yang berbeda. Dan, globalisasi adalah tampilan mutakhir kapitalisme, yang merupakan terjemahan secara nyata kapitalisme klasik Adam Smith.

Globalisasi pada dasarnya adalah proses sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain.⁵ Dan, dalam sejarah manusia, proses dominasi ini telah ada lebih dari lima ratus tahun yang lalu. Dalam hal ini, proses tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap. *Tabap pertama* adalah periode kolonialisme. Tahap ini didasari oleh keterbatasan bahan baku industri di negeri sendiri, sehingga mengharuskan ekspansi ke nagara lain. Inilah babak pertama penjajahan manusia secara fisik. Dan, proses ini telah berlangsung selama berabad-abad. Betapa masih ingat dalam benak kita bahwa negara kita pernah terjajah lebih dari tiga setengah abad, sebuah kurun waktu yang sangat lama, sebanding dengan enam turunan manusia. Periode ini berakhir pasca Perang Dunia II, ditandai dengan banyaknya revolusi negara-negara jajahan menuju kemerdekaan.

Tabap kedua adalah neo-kolonialisme atau *developmentalisme*. Berakhirnya seteru Perang Dunia II menandakan era baru formasi dunia. Akan tetapi, itu bukan berarti era penjajahan telah selesai, melainkan penjajahan akan tetap ada, dengan menampilkan wajah manis dan berseri. Lepas dari mulut harimau, masuk mulut buaya, pepatah itu yang barangkali tepat untuk menggambarkan keadaan negara-negara yang baru merdeka. Sebab, pada fase ini, penjajahan secara fisik dan langsung memang sudah tidak ada, sebagaimana dituangkan dalam *Declaration of Human Right*, yang merupakan buatan negara-negara kolonial. Akan tetapi, penjajahan kali ini lebih kepada penjajahan non fisik, khususnya penjajahan teori dan ideologi. Tahun 1944 dilaksanakan pertemuan di *Bretton Woods*, di Amerika Serikat, yaitu antara negara-negara Eropa dan Amerika. Hasil kesepakatan ini, yang dikenal dengan Kesepakatan *Bretton Woods*, secara umum menghasilkan tiga organisasi internasional

⁵Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist, 2003), hlm. 45.

baru. *Pertama*, untuk mengatur sistem moneter internasional, dibentuklah IMF (*International Fund Monetary*). *Kedua*, untuk mendanai proyek-proyek pembangunan negara dunia ketiga, dibentuklah WB (*World Bank*), dengan *hidden agenda* menciptakan ketergantungan negara bekas jajahan. *Ketiga*, untuk mengatur lalu lintas perdagangan multilateral, dicanangkan GATT (*General Agreement on Tarrif and Trade*). Semuanya bertujuan untuk mengendalikan arus ekonomui dunia untuk melakukan hegemoni terhadap dunia ketiga, dengan slogan pembangunan.

Doktrin pembangunanisme pada era ini boleh jadi merupakan trend dunia yang tak terbantahkan. Di saat negara-negara yang baru merdeka memerlukan pembangunan yang intens, organisasi dunia ini datang dengan menawarkan bantuan yang menggiurkan, meskipun sebenarnya sangat mematkan. Di Indonesia sendiri, pembangunan menjadi sebuah ideologi bangsa yang menghujam kuat di jiwa para birokrat, khususnya pada masa Orde Baru. Dengan dalih *trickle down effec*, efek menentes ke bawah, pembangunan seakan-akan satu-satunya jalan untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari hegemoni teori Barat yang ditancapkan ke negara dunia ketiga. Sebagai contoh, Rostow dengan teori pembangunannya yang terkenal dengan *the five-stage scheme*. Menurutnya, semua masyarakat pada dasarnya merupakan masyarakat “tradisional”. Tradisional dalam hal ini dianggapnya sebagai suatu keterbelakangan, sehingga menjadi masalah yang harus diselesaikan. Untuk itu, tradisional harus diubah menuju modern. Untuk menuju ke masyarakat modern, *development* mutlak diperlukan.

Tabap ketiga adalah era globalisasi yang terjadi menjelang abad kedua puluh satu. Era ini ditandai dengan proses liberalisasi di segala bidang. Liberalisasi ini sesungguhnya dipaksakan melalui *Structural Adjusment Program* (SAP), yakni persetujuan perdagangan yang disepakati melalui lembaga dunia WTO (*World Trade Organization*). Melalui WTO ini, arus perdagangan dunia dikendalikan oleh negara-negara kaya yang menanamkan

modalnya di WTO. Dan ironisnya, mekanisme pengambilan keputusan WTO dilakukan melalui pengambilan suara anggota, yang didasarkan pada besarnya modal yang ditanamkan.

2. Bergesernya Peran Negara

Sebagaimana gagasan kapitalisme klasik Adam Smith, bahwa aspek kehidupan manusia akan dibimbing oleh tangan-tangan ajaib yang tak terlihat (*the invisible hand*). Serahkan segala sesuatunya kepada pasar, singkirkan peran negara, sebagaimana doktrinnya yang terkenal dengan *laissez faire laissez passer*. Dan, itulah realitas dunia hari ini, pasar adalah kata kunci kesejahteraan manusia. Tiga proyek besar globalisasi, yakni privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi, adalah racun yang paling ampuh untuk melumpuhkan kekuatan negara. Jika negara sudah tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak atau fasilitas publik, apa yang mampu diperbuat oleh negara. Saat ini, privatisasi BUMN kepada pihak swasta telah mencapai titik yang sangat dramatis. Berbagai alat vital negara yang sedianya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dijual ke pihak swasta. Dengan dalih efisiensi dan efektivitas, pasar dibiarkan menentukan dan menguasai nasib warga negara, yang terjadi kemudian adalah negara hanya menjadi penonton akan menjadi awal penderitaan untuk rakyatnya, lebih dari itu ia tidak mampu berbuat apa-apa.

Penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), yang saat ini bermetamorfosis menjadi MEA, adalah upaya untuk menghilangkan sekat batas antar negara yang selama ini membatasi aktivitas ekonomi. Pasar bebas mengandaikan adanya persaingan bebas antar negara anggota, tanpa ada campur tangan dan intervensi dari negara.

Inilah yang oleh Kenechi disinyalir sebagai matinya negara-bangsa (*the end of nation-state*). Jika peran negara sudah mulai digantikan oleh peran lembaga dunia seperti WTO, IMF, WB, serta TNC/MNC, maka sudah tiba lonceng kematian negara-bangsa. Hal yang senada juga dilontarkan oleh Noreena

Heertz, bahwa jika peran negara yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat sudah digantikan oleh kekuatan pasar, maka terjadilah apa yang disebut *the death of democracy*, matinya demokrasi.

Saat semua aset negara diambil alih oleh pihak swasta inilah kredibilitas negara dipertanyakan. Sayangnya, pihak swasta dalam hal ini bukanlah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh warga negaranya. Namun, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan raksasa global, yang beroperasi di hampir seluruh penjuru dunia. Perusahaan tersebut adalah TNC (*Trans National Corporation*) atau MNC (*Multi National Corporation*). Perusahaan inilah yang mengambil alih secara diam-diam (*silent take over*) semua yang dimiliki oleh negara. Inilah dunia baru yang segera dan bahkan sudah dimulai, dunia di mana kekayaan perusahaan menyerap habis kekayaan negara.⁶

Tampak jelas bahwa kekayaan TNC/MNC menguasai kekuatan ekonomi hampir di seluruh negara di dunia. Ini sama artinya TNC/MNC mempunyai kekuatan politik di hampir semua negara, jika logika politik dipahami sebagai perpanjangan tangan logika ekonomi. Para “perampok negara” tersebut sengaja melakukan aneksasi pemasarannya di berbagai negara, tentunya dengan bantuan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia, seperti WTO, WB, dan IMF. Inilah dunia di mana tangan pemerintah terikat dengan erat, dan masyarakat semakin tergantung kepada perusahaan. Bisnis menjadi kekuatan pengendalian politik dan ekonomi, perusahaan secara bebas menentukan aturan main, dan pemerintah menjadi wasit dan sekaligus penontonnya. Adapun rakyat adalah objek yang dipertainkan. Dalam kondisi seperti inilah negara sampai pada titik nadir ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan tersebut bukannya keinginan negara, melainkan atas bimbingan tangan-tangan gaib yang tak terlihat.

Setelah negara dirampok secara sembunyi-sembunyi tersebut, maka pasar (baca: modal, uang)-lah yang akan menentukan

⁶Noorena Hertz, *Perampok Negara* (Yogyakarta: Alenia, 2005), hlm. 19.

segalanya. Ia akan menggantikan peran negara sebagaimana yang selama ini telah ada. Bedanya, jika negara punya misi untuk menyejahterakan warganya secara umum, maka perusahaan mempunyai tekad untuk mensejahterakan diri orang-orang yang berprestasi (baca: bermodal). Inilah yang oleh McClelland diandaikan sebagai masyarakat yang berprestasi, di mana *need for achievement* menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan untuk berprestasi itu mengabaikan nilai moral dan sosial, sehingga melahirkan watak kapitalisme.

Sampai di sini, yang harus dimengerti adalah fakta bahwa mereka menjadi biang keladi fenomena kemiskinan di sebagian besar negara-negara di dunia. Pada dasarnya, perusahaan besar tersebut tak ubahnya melakukan penjajahan, eksploitasi, dan pengisapan kelompok-kelompok yang lemah, yang seharusnya dipelihara oleh negara. Dalam kaitannya dengan hal ini, negara tidak lagi sebagai pelindung dari keserakahan segelintir orang, ia tidak lebih hanya menjadi anjing penjaga, meminjam istilah Marx, yang mengamankan perusahaan untuk mengisap dan membinasakan rakyat secara perlahan-lahan.

3. Hegemoni Global

Jika kita disuruh memilih, antara hidup kaya atau miskin, sepertinya setiap orang akan memilih untuk hidup kaya, mewah, dan harta yang berlimpah. Pun demikian, kebanyakan orang akan memilih adanya kebebasan individu yang tak terbatas oleh aturan-aturan yang menjerat. Namun, sering kali kemungkinan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kecenderungan inilah yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai produk hegemoni. Hegemoni merupakan upaya pemaksaan (*coercion*) suatu kelompok atas kelompok yang lain dengan cara persetujuan kelompok tertindas melalui sistem yang ada. Dengan kata lain, hegemoni merupakan sebuah upaya penguasa global untuk membentuk pikiran, pandangan, paradigma, dan perilaku masyarakat dan negara yang dikuasai agar sesuai dengan yang dikehendaknya demi kelangsungan kekuasaan. Di sini, kelompok dunia pertama,

dengan paradigma kapitalisnya, mencoba menancapkan hegemoninya kepada negara-negara dunia ketiga yang merupakan negara berkembang.

Hegemoni dibentuk melalui pranata masyarakat dalam menciptakan persepsi tentang realitas sosial. Di sini, hegemoni merupakan bentuk kontrol dan kekuasaan yang sangat penting dan efektif. Sehingga, kekuasaan hegemonik merupakan kekuasaan melalui persetujuan yang mencakup jenis penerimaan intelektual dan emosional atas tatanan sosial-politik yang ada. Persetujuan untuk menerima “paksaan” secara halus ini menunjukkan ungkapan intelektual dan moral massa untuk terikat pada ideologi dan kepemimpinan politik sebagai ungkapan keyakinan dan aspirasinya.

Konsep pembangunan adalah bentuk riil dari upaya hegemoni dunia ketiga oleh kekuatan kapitalisme. Hampir setiap negara dunia ketiga percaya dan yakin bahwa dengan pembangunan, kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Melalui doktrin modernisasi, pembangunan seakan-akan alternatif tunggal dalam proses perkembangan sebuah negara. Doktrin pertumbuhan Rostow adalah bagian dari intelektual hegemonik ideologi *developmentalism*. Dengan teori pertumbuhannya, pembangunan adalah prasyarat mutlak untuk mengubah negara yang tradisional menuju negara modern dengan orientasi industrialisasi. Teori *five-stage scheme* (skema lima tahap) oleh W.W. Rostow disebarluaskan hampir ke seluruh negara dunia ketiga. Dan terbukti, semua negara tersebut mengikuti dan menikmati upaya hegemoni tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat enjoy dan bangga dalam konteks pembangunanisme. Era Orde Baru menjadi saksi betapa pembangunan ekonomi, dengan logika *trickle down effect* (dampak menetes ke bawah), menjadi persepsi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menjanjikan banyak kemanfaatan, namun ternyata pembangunansime terbukti paradoks dengan menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera.

Saat ini, bentuk hegemoni kaum kapitalis tengah mencapai relevansinya. Kemajuan sistem komunikasi dan informasi adalah senjata ampuh yang dijadikan gerbong dalam upaya membangun hegemoni tersebut. Dengan mengampanyekan sarana komunikasi yang canggih, negara berkembang dipaksa untuk melakukan ketergantungan kepada negara-negara produksi.

Emanuel Wellerstain dan teman-temannya di *Fernan Broudeh Center Binghamton University* memperkenalkan sistem dunia perspektif wilayah kerja (*international division of labour*). Dalam hal ini, dunia dibagi menjadi tiga wilayah kerja. *Pertama*, negara inti (*core*), terdiri atas negara yang memiliki proses-proses produksi yang canggih. Di daerah ini, borjuis indigenous memiliki industri otonom yang memproduksi komoditas manufaktur untuk pasar dunia. Negara *core* pada umumnya adalah Northwest Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia. *Kedua*, negara pinggiran (*periferi*), terdiri atas negara-negara yang memiliki proses produksi yang sederhana. Biasanya produk-produk negara *periferi* ikut menyumbang proses akumulasi kapital di negara-negara *core* karena dagangan memerlukan pertukaran-pertukaran yang tidak seimbang. Kontrol buruh juga dijalankan dengan kekerasan, dengan struktur negara yang lemah. *Ketiga*, *semi periferi*, mempunyai kompleksitas kegiatan ekonomi, modus kontrol buruh, mesin negara yang kuat, dan sebagainya. Fungsi politik *periferi* adalah sebagai *buffer zone* antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Secara historis, *semi periferi* terdiri atas negara-negara yang sedang naik atau turun dalam sistem dunia.

Hegemoni alat-alat produksi dalam hal ini dilakukan oleh negara *core* kepada negara-negara *semi periferi* ataupun *periferi*. Ketergantungan terhadap alat komunikasi dan informasi yang perkembangannya dalam hitungan hari ini menjadikan negara *periferi* ataupun *semi periferi* mau tidak mau harus berusaha mengikuti perkembangan pasar, dengan melakukan ikatan kerja terhadap negara *core*. Kalau sudah seperti ini, tak pelak terjadi sebuah ketergantungan, yang pada akhirnya mampu memengaruhi

kegiatan politik, ekonomi, ataupun budaya di negara baik *periferi* maupun *semi periferi*.

Pasar bebas dalam hal ini menjadi pupuk yang menumbuhsuburkan proses hegemoni. Dengan dogma persaingan sehat dan efisiensi, negara-negara miskin dan berkembang mencoba dihegemoni dengan berbagai barang yang murah dan berkualitas. Inilah peluang bagi perusahaan global untuk menancapkan kuku hegemoninya dalam membentuk budaya dan pola hidup masyarakat. Dengan barang yang diciptakan, pola hidup masyarakat dibangun dengan perlahan. Pola konsumerisme adalah bagian dari target proses hegemoni. Jika masyarakat sudah mempunyai pola konsumerisme, maka pengendalian melalui barang-barang kebutuhan atas kesadaran dan pola hidup menjadi efektif.

Sampai di sini peran negara kemudian turun pada derajat yang sangat rendah. Negara dibuat diam seribu bahasa atas pola liberalisasi. Kuasa negara yang sebenarnya mempunyai kekuatan memaksa mencoba digeser dengan dalih-dalih demokrasi, liberalisasi, dan modernisasi. Hegemoni pasar atas negara dan masyarakat adalah bentuk kekuasaan negara atau kelompok dominan untuk membentuk kesadaran kelompok subordinat.

Di samping itu, hegemoni juga menggunakan pendidikan sebagai piranti penyokongnya. Jika pendidikan diyakini sebagai upaya sadar membangun manusia yang dewasa dan sempurna, maka dengan pendidikanlah tipologi manusia konsumeris dibentuk. Di sini pendidikan sengaja di-*set up* dengan konsep yang berorientasi pada pembangunan orientasi pasar. Sehingga, mentalitas materealistik dan hedonis menjadi pintu masuk untuk melanggengakan dominasi kuasanya. Satu contoh yang relevan adalah wacana pemikir Barat yang pro-kapitalis menempati porsi yang besar dalam kurikulum pendidikan, lebih-lebih dalam zaman Orde Baru. Ini adalah bagian dari upaya hegemoni wacana kepada masyarakat, sehingga kesadaran intelektualnya akan senantiasa *matching* dengan kekuatan kapitalis.

Jika sekolah yang merupakan institusi sakral mampu dijamah oleh pasar, maka sudah barang pasti *output* dari sekolah akan selalu berorientasi pada pasar. Di sinilah kehebatan hegemoni pasar mendapatkan relevansi yang nyata. Sehingga, masyarakat kita yang sudah berabad-abad dikuasai oleh kekuatan asing yang cenderung kapitalis mempunyai kesadaran dan intelektual yang sudah *mind set*.

4. Spirit Etik Bisnis

Weber dalam sebuah risetnya pernah menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama penyebab munculnya semangat kapitalisme adalah apa yang ia sebut dengan etika Protestan.⁷ Etika Protestan ini merupakan dogma agama yang mampu menjadi pemacu untuk melakukan kapitalisasi ekonomi. Sehingga, Weber memberikan komparasi sederhana antara karakter orang Katolik dan orang Protestan. Menurutnya, orientasi orang Katolik itu bisa disederhanakan dengan istilah “tidur nyenyak”. Adapun orientasi Protestan digambarkan dengan ungkapan “makan enak”.

Spirit makan enak inilah yang kemudian memotivasi orang berusaha menjadi orang kaya dan mengumpulkan banyak uang. Hal ini secara sistemik melahirkan kecenderungan kapitalis. Dan dalam sejarah, kapitalisme terbukti telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme, di mana orang akan memburu kapital sampai ke ujung dunia, yang akhirnya menyebabkan terjadinya eksploitasi. Namun, efek positif yang juga dilahirkan adalah adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang luar biasa hebat. Sehingga, ideologi kapitalisme yang konon lahir dari agama ini menjadi ideologi ekonomi yang banyak digunakan di seluruh dunia.

Kajian tentang relasi antara spiritualitas dan ekonomi (bisnis) pernah diungkap oleh Weber dalam karya besarnya, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Buku ini meneguhkan

⁷ Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2003), hlm. 115.

bahwa spirit agama mampu mengembangkan semangat kerja dalam kapitalisme. Weber seakan membantah tegas teori determinisme Marx, di mana ekonomilah yang menjadi determinasi atas segala aspek kehidupan. Semangat keberagamaan mampu menjadi dasar perilaku ekonomi dan bisnis.

Kajian tentang bisnis Islam juga pernah dilakukan oleh Irwan Abdullah (1994) dengan judul "*The Muslim Businessmen: Religious Reform and Economic Modernization in a Central Javanese Town*". Irwan membuktikan bahwa ideologi agama (Muhammadiyah) mampu memengaruhi semangat bisnis para pengikutnya dalam mencapai kesuksesan.

Terminologi etik atau etika selalu disejajarkan dengan istilah yang semakna seperti moral, akhlak, adab, dan lainnya. Di sini, etika dipahami sebagai sistem perilaku yang melekat dalam diri seseorang. Senada dengan penggunaan istilah akhlak oleh al-Ghazali, dipahami sebagai suatu perangai yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dalam diri seseorang, secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.⁸

Dalam suatu definisi, etika merupakan model perilaku yang hendaknya diikuti untuk mengharmoniskan hubungan manusia, meminimalkan penyimpangan dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.⁹ Dalam pengertian ini, etika tidak lagi menjadi sesuatu yang bebas dan netral, namun selalu berupaya menuju kepada kebaikan dan hal yang positif. Dengan demikian, spirit etik merupakan etika spiritual yang senantiasa membimbing manusia selalu berada dalam koridor kebenaran. Jika dikaitkan dengan ekonomi dan bisnis Islam, maka spirit etik berarti dorongan perilaku spiritual (spirit-etik) yang senantiasa membimbing para pelaku ekonomi untuk menggunakan prinsip Islam (syari'ah)

⁸ Al-Ghazali, *Mengobati Penyakit Hati* (Bandung: Karisma, 2000), hlm. 31.

⁹ Taha Jabir, *Bisnis Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2005), hlm. 5.

dalam kegiatan ekonomi. Sehingga, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang pengusaha Muslim senantiasa mengacu pada nilai-nilai Islam.

Spirit Islam dalam konteks ini menjadi “payung” yang akan melindungi kegiatan ekonomi seorang Muslim. Pada saat yang bersamaan, spirit etik ini juga mendorong untuk semangat dan giat bekerja dalam rangka mengupayakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk manusia lainnya.

Spirit etik ekonomi Islam secara umum berangkat dari kerangka berpikir sebagai berikut. *Pertama*, Islam pada dasarnya mensyaratkan umatnya untuk kuat secara ekonomi. Hal ini didasarkan pada beberapa ajaran Islam yang secara mutlak mensyaratkan umatnya untuk mempunyai uang. Secara umum, konsep zakat dan haji adalah dua rukun Islam yang meniscayakan umat Islam harus kaya. Sehingga, kesempurnaan berislam hanya akan tercapai apabila umat Islam itu mampu secara ekonomi.

Kedua, Islam menghendaki umatnya untuk kaya, namun dengan kadar ketentuan tertentu. Artinya, Islam bukanlah kapitalisme yang menganjurkan umatnya untuk menjadi kaya sekaya-kayanya, atau menjadi miskin semiskin-miskinnya. Islam juga bukan sosialisme yang membatasi kepemilikan pribadi. Namun, Islam menghendaki distribusi kekayaan dan ekonomi yang adil. Kapital dan kekayaan itu tidak boleh berkutat pada sekelompok orang saja, sementara lainnya sangat kekurangan. Maka, dalam Islam, setiap orang yang mampu diwajibkan berzakat. Secara sosial, zakat adalah upaya melakukan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Sehingga, ketika orang semakin kaya, semakin banyak pula harta yang akan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan.

Ketiga, Islam mampu menjadi spirit dalam kegiatan ekonomi. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam sistem kapitalisme selama ini adalah adanya nalar koruptif yang menghinggapi para pelaku ekonomi. Akibatnya, orang secara bebas bisa merampas kapital dengan jalan yang tidak sah. Pada

titik tertentu, akan menyebabkan krisis dan depresi ekonomi. Nah, spirit etik Islam dalam hal ini diharapkan mampu memberikan bekal bagi para pelaku ekonomi dan bisnis untuk selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan benar. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, keberkahan, kemanfaatan, dan sebagainya akan menuntun dan membimbing menuju perilaku ekonomi yang baik. Jika hal ini mampu dibangun dalam karakter Muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka equilibrium ekonomi yang adil akan mampu tercapai.

Spirit etik bisnis Islam ini menjadi cikap bakal sipirtualitas bisnis para penguasaha Muslim di Kudus ini. Spirit Gusjigang seakan menjadi “pembimbing” yang selalu mengarahkan strategi dan cara bisnis yang handal bagi masyarakat. Ada keyakinan kuat bahwa rezeki yang banyak dan barokah pintu utamanya adalah melalui berbisnis atau berdagang.

Meskipun beberapa kajian menyatakan bahwa spirit Gusjigang ini lambat laun mengalami distorsi, namun secara makro kita bisa melihat bahwa spirit tersebut masih ada dan melekat. Harus diakui bahwa perkembangan zaman dan globalisasi berpotensi mengikis spirit dan karakter Gusjigang tersebut. Cara bisnis orang Kudus tetap saja dipayungi dengan spiritualitas agama dalam kegiatan perekonomiannya. Hal ini yang kiranya perlu menjadi perhatian, bagaimana pelestarian spirit Gusjigang tersebut masih tetap dilestarikan oleh generasi.

5. Gusjigang dan Semagat “Glokalitas”

Gusjigang boleh jadi hanyalah mitos lokal yang menjadi sistem kepercayaan masyarakat. Namun, spirit lokalitas tersebut tentunya memiliki legitimasi historis yang bersambung dengan realitas saat ini. Kearifan lokal Gusjigang, yang merupakan ajaran arif Sunan Kudus, menjadi spirit etik bisnis para pengusaha atau saudagar Kudus, di mana spirit tersebut menyatu, menginternalisasi melalui laku bisnis.

Menyambut tantangan global yang semakin deras, maka semangat kearifan lokal tampaknya menjadi oase yang akan menyegarkan kehidupan. Spirit yang mentradisi ini akan menyublim menjadi karakter tangguh dalam menjalankan roda ekonomi dengan integritas Islami yang merahmati. Spirit lokal yang mampu mewarnai laju arus global inilah yang kiranya menjadi terminologi baru, glocalitas. Hal ini sebagaimana bunyi sebuah slogan, *think globally act locally*. Terlalu naif ketika kita mengabaikan globalisasi, namun terlalu picik kalau kita harus berpikir lokal. Berpikir secara global dengan tindakan lokal adalah kearifan dalam menyambut globalisasi tersebut.

Secara konsep, glocalitas mengacu pada istilah glocalisasi yang telah diperkenalkan pada tahun 1990-an. Istilah ini dipopulerkan oleh sosiolog Roland Robertson, di mana glocalisasi dideskripsikan sebagai hasil penyesuaian lokal baru terhadap tekanan global. Dengan kata lain, glocalisasi mengisyaratkan munculnya tendensi universal dan terpusat secara bersamaan. Sebagai contoh, menjamurnya restoran McDonald's di seluruh dunia adalah contoh globalisasi. Adapun perubahan menu restoran demi menarik konsumen lokal adalah contoh glocalisasi. Dan, konsep ini bagi bisnis global menjadi prasyarat yang tak tertawarkan. Sebagaimana konsep pemasaran, bahwa konsumen menjadi referensi utama dalam menentukan jenis dan karakter sebuah produk.

Gusjigang sebagai spirit glocalitas berarti semangat berbisnis dengan tetap menjaga nilai Islam dan perilaku etik adalah strategi dalam bersaing global. Dalam konteks MEA, maka spirit Gusjigang akan menjadi cambuk semangat dalam berbisnis secara baik, tidak menggunakan pola menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan, nilai lokal ini jika mampu disosialisasikan secara baik, khususnya melalui dunia dagang atau bisnis, maka lambat laun akan menjadi nilai universal yang bisa digunakan oleh semua orang.

Di saat kekuatan ekonomi global bercorak kapitalis yang menggurita, yang mampu menepikan peran negara, maka spirit etik bisnis ini akan mampu menangkai segala bentuk hegemoni dan kapitalisasi secara bebas yang merupakan karakter bawaan kapitalisme.

C. Simpulan

Tulisan ini boleh jadi belum mampu menuntaskan secara operasional konsep spirit Gusjigang. Namun, ide dasarnya adalah bagaimana spirit agama yang mengandung unsur kebaikan mampu memberikan pengaruh pada perilaku dan kegiatan dalam berbisnis dan berekonomi. Sehingga, pada saatnya, kegiatan ekonomi yang tampaknya adalah persoalan duniawi mampu dikonversi menjadi amalan kebaikan karena spirit etik yang melatarbelakanginya atau *bi husni an-niyyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *The Muslim Businessmen: Religious Reform and Economic Modernization in a Central Javanese Town*, t.tp.: t.p., 1994.
- Abrahamsen, Rita, *Sudut Gelap Kemajuan*, Yogyakarta: Lafal Pustaka, 2004.
- Adityangga, Krishna, *Membumikan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arif, Saiful, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fakih, Mansour, *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist, 2003.
- _____, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist, 2003.
- Fukuyama, Francis dan Samuel P. Huntington, *The Future of World Order*, Yogyakarta: Ircisod, 2005.
- al-Ghazali, *Mengobati Penyakit Hati*, Bandung: Karisma, 2000.
- Giddens, Antoni, *Jalan Ketiga*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Hertz, Noorena, *Perampok Negara*, Yogyakarta: Alenia, 2005.
- Jabir, Taha, *Bisnis Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2005.
- Jalil, Abdul, “Spiritual Entrepreneurship: Studi Transforamsi Spiritual Pengusaha Kudus”, *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Mul Khan, Abdul Munir, *Bisnis Kaum Sufi: Studi Tarekat dalam Masyarakat Industri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Sarana, 2001.

- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rahmawati, Anita, *Ekonomi Makro Islam*, Kudus: STAIN Kudus, 2009.
- Rothermund, Dietmar, *Great Depression: Depresi Besar Ekonomi Amerika 1929-1930 dan Dampaknya terhadap Kebancuran Ekonomi Dunia*, Jakarta: Imperium, 2010.
- Said, Nur, *Jejak Perjuangan Sunan Kudus*, Yogyakarta: Brillian Media Utama, 2010.
- Tabb, William K., *Tabir Politik Globalisasi*, Yogyakarta: Lafal Pustaka, 2006.
- Weber, Max, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2003.
- Winarto, dkk., “Nilai-nilai Spiritualitas dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan”, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Politeknik Negeri Semarang, 2013.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan
